

## ABSTRAK

Bawaslu berperan penting dalam keberhasilan dan kualitas Pemilu. Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan Pemilu. Selain itu, Bawaslu juga memiliki kewenangan, salah satunya menangani pelanggaran administratif Pemilu. Adanya tugas dan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki dwifungsi, mengingat pengawasan masuk ranah kekuasaan eksekutif, sedangkan penanganan pelanggaran masuk dalam ranah kekuasaan yudikatif. Implementasi konsep dwifungsi telah diimplementasikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan batasan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan dwifungsinya, serta menganalisis konsep ideal yang dapat diterapkan oleh Bawaslu.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan batasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan terbagi menjadi 2 yaitu batasan ruang lingkup dan batasan waktu. Batasan ruang lingkup artinya Bawaslu melakukan pengawasan secara menyeluruh di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, sedangkan batasan waktu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara sampai pelantikan peserta Pemilu. Adapula batasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menangani pelanggaran administratif Pemilu yaitu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus temuan dan laporan dari dugaan pelanggaran administratif Pemilu. Berkaitan dengan konsep dwifungsi yang dimiliki lembaga Bawaslu dinilai belum relevan untuk diterapkan karena bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu, serta dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan konflik berkepentingan. Maka dari itu, diperlukan adanya pengaturan konsep ideal mengenai lembaga Bawaslu. Terdapat dua pilihan konsep, *Pertama* Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas, *Kedua* Bawaslu sebagai Lembaga Penegak Hukum Pemilu.

**Kata Kunci : Bawaslu, Pelanggaran Administratif Pemilu, Pengawasan, Provinsi Jawa Tengah.**

## **ABSTRACT**

*The existence of Bawaslu plays an essential role in determining the success and quality of elections. Bawaslu has the task of conducting supervision at every stage of the election. In addition, Bawaslu also has the authority, one of which is to handle administrative election violations. These duties and rules show that Bawaslu has a dual function, considering that supervision is included in the realm of executive power, while handling violations is included in the sphere of judicial power. The Central Java Province Bawaslu implemented a dual function concept in the 2019 General Election. This study aims to describe the limitations of the duties and authority of the Central Java Provincial Bawaslu in carrying out its dual functions and analyze the ideal concept that Bawaslu can apply.*

*This research uses a normative juridical approach method with descriptive-analytical research specifications. The type of data used is qualitative data with secondary data sources. The data collection method was carried out by literature study and interviews which were then analyzed using qualitative analysis methods.*

*The results showed that the limits of the Central Java Province Bawaslu in conducting supervision were divided into 2, namely scope limits and time limits. The scope limitation means that Bawaslu works comprehensive control at every election stage. At the same time, the time limit starts no later than 20 months before the voting day until the inauguration of the elected election participants. There are also limitations of the Central Java Provincial Bawaslu in handling administrative violations of elections, namely receiving, examining, reviewing, and deciding findings and reports of alleged administrative violations of elections. The concept of dual function owned by Bawaslu institutions is considered irrelevant because it contradicts the principle of separation of powers according to Montesquieu, and can potentially lead to abuse of power and conflicts of interest. Therefore, regulating the ideal concept of the Bawaslu institution is necessary. There are two choices of concepts, first, Bawaslu as a Supervisory Institution, and second Bawaslu as an Election Law Enforcement Institution.*

**Keywords : Bawaslu, Election Administration Violations, Supervision, Central Java Province.**